

PERSEPSI PELAKU UMKM TERKAIT PERAN
PEMERINTAH DAERAH DI DALAM PENURUNAN TINGKAT
PENGANGGURAN DI KECAMATAN TANJUNG SELOR

SKRIPSI

OLEH :

QHAIRUL FAJRIL

202042001

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar (S1)

Sarjana Ekonomi



JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS KALTARA

TANJUNG SELOR

2024

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
 BAB II DASAR TEORI	9
2.1 Pengertian Persepsi.....	9
2.2 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	10
2.2.1 Karakteristik dan Ciri-Ciri UMKM	14
2.2.2 Keunggulan dan Peluang Pembangunan	19
2.2.3 Sasaran Pembinaan dan Pemberdayaan.....	20
2.2.4 Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	21
2.3 Pengertian Peran.....	21
2.4 Pengertian Peran Pemerintah	24
2.5 Pengertian Daerah.....	25
2.6 Pengertian Pengangguran.....	25
2.6.1 Tingkat Pengangguran.....	26
2.6.2 Macam-Macam Pengangguran.....	28
2.6.3 Dampak Pengangguran.....	30
2.7 Kerangka Pikir.....	32
2.8 Hipotesis	32
 BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Pendekatan Penelitian.....	33
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
3.3 Definisi Operasional.....	34
3.4 Pengukuran Variabel Penelitian.....	36
3.5 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	37
3.6 Jenis dan Sumber data.....	37
3.7 Metode Pengumpulan data.....	38

3.8	Metode Analisis.....	38
3.9	Alat Analisis Data.....	40

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan orientasi pembangunan nasional berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara material maupun spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun secara hakikat pengertian pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkeseluruhan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Indonesia merupakan negara ke empat yang memiliki jumlah penduduk yang terbanyak di dunia. Indonesia tercatat memiliki jumlah penduduk / kependudukan yang tidak dapat di hindari adalah pengangguran. Pengangguran disebabkan karena meningkatnya tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah salah satu indikator di bidang ketenagakerjaan adalah pengangguran Tingkat pengangguran akan mengukur sejauh mana angkatan kerja dapat diserap oleh lapangan pekerjaan yang disediakan tersebut. Meningkatnya angka pengangguran akan berdampak pada permasalahan kemiskinan, kriminalitas, dan keadaan ekonomi pada penelitian terdahulu yang di sampaikan oleh Franita Riska (2016) pada negara-negara berkembang pengangguran masi menjadi suatu permasalahan yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah karena dapat memberikan dampak pada keadaan ekonomi dan sosial suatu negara.

Merujuk pada data yang diperoleh Badan Pusat Statistik Indonesia di kutip melalui cnnindonesia, disebutkan bahwa jumlah pengangguran di indonesia mulai berkurang sebanyak (560 ribu orang) atau (6,77 % di banding per Agustus 2022) karna pengangguran di indonesia tahun 2023 per Agustus sebanyak 7,86 juta, data tersebut menunjukan suatu permasalahan bahwa hingga saat ini masih perlu perhatian di pemerintah pusat atau pemerintah daerah di tuntut mampu menyelesaikan permasalahan pengangguran tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian terkait. Persepsi pelaku UMKM terkait peran pemerintah daerah di dalam penurunan tingkat pengangguran di kota tanjung selor.

Ekonomi merupakan suatu sektor yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena sangat berhubungan dengan kelangsungan hidup masyarakat terutama untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

Kegiatan ekonomi manusia dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan ekonomi rakyat pada dasarnya merupakan manifestase dari tuntutan pembangunan ekonomi yang berlandaskan kepada nilai-nilai demokrasi yang universal, yaitu menjadikan manusia sebagai subjek pembangunan dengan otonomi sebagai titik tolaknya.

Melonjaknya pertumbuhan penduduk suatu negara yang diiringi dengan penambahan angkatan kerja telah menimbulkan permasalahan yang kompleks, hal ini disebabkan karena belum berfungsinya semua sektor kehidupan masyarakat dengan baik serta belum meratakan pembangunan di segala bidang sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan laju perkembangan penduduk yang cepat dan dinamis. Adanya sektor formal tidak mampu memenuhi dan menyerap angkatan kerja yang terus meningkat secara maksimal yang disebabkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan angkatan kerja yang tumbuh dengan cepat dengan lapangan kerja yang tersedia sehingga timbulnya yang namanya pengangguran. Karena sektor informasi menjadi suatu bagian yang penting dalam mengatasi permasalahan ini salah satunya dengan adanya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Usaha dalam memperoleh rezeki dikenal dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki peran penting dalam perekonomian indonesia. Karena dengan UMKM ini pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Menjadi jelas kiranya dimana posisi usaha mikro dan menengah di dalam kancah pembangunan ekonomi, UMKM tidak lain adalah sekelompok sektor

yang bersama-sama dengan usaha besar mengerakan roda produksi juga tentunya untuk membuka lapangan pekerjaan.

Ketika krisis ekonomi menerpa dunia otomatis memperburuk kondisi ekonomi di indonesia kondisi krisis terjadi periode tahun 1997 sampai 1998 hanya sektor UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. Data badan statistik merilis keadaan tersebut pasca krisis ekonomi jumlah UMKM tidak berkurang justru meningkat pertumbuhannya, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu jumlah pengusaha di indonesia sebanyak 56.539.560 unit dari jumlah tersebut UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau sebesar 99,99%. Sisanya sekitar 0,01% atau sebesar 4.968 unit adalah usaha bersekala besar. Fenomena ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan bagi mendeukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di indonesia dan mempegaruhi sektor-sektor yang lain bisa berkembang.

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh supriyanto (2006:1) menyimpulkan dalam penelitiannya ternyata UMKM mampu menjadi solusi penanggulangan UMKM memiliki potensi yang cukup baik,karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu menyerap lebih lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30% upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM dan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (kaufman dan hotehkiss.1999). Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (sadono,2003). Penganggguran dapat terjadi di sebabkan oleh ketidak seimbangny pada pasar tenaga kerja, hal ini menunjukan bahwa jumlah tenaga kerja yang di tawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang di minta.

Di Kabupaten Bulungan khususnya kecamatan Tanjung Selor dapat dilihat bahwa pertumbuhan ankatan kerja dari tahun 2023 mencapai 86,492,. Begitu pula dengan perkembangan UMKM yang semakin meningkat, sedangkan tingkat kesempatan kerja mencapai 95,46 tahun 2023, UMKM merupakan suatu usaha dari segi formasi yang di

harapkan mampu menyerap tenaga kerja sehingga berkurangnya pengangguran, baik pengangguran terdidik ataupun tidak terdidik.

Mengingat akan peran UMKM yang begitu besar bagi pembangunan Indonesia juga sebagai penyerap tenaga kerja terbanyak maka sudah sepatutnya ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah, khususnya Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, yang menurut data dari dinas Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan bahwa UMKM di Kecamatan Tanjung Selor terjadi perkembangan jumlah unit UMKM dari tahun ke tahun. Jumlah UMKM di Kecamatan Tanjung Selor pada tahun 2020 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 database UMKM di Kecamatan Tanjung Selor tahun 2020 – 2023

No	Tahun	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	2020	2997	431	52	3480
2	2021	8296	431	52	8779
3	2022	8296	426	52	8774
4	2023	8442	426	52	8920

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, dan tenaga Kerja Kabupaten Bulungan.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah UMKM dari tahun 2020 – 2023 meningkat baik dari usaha Mikro, kecil, dan Menengah yang berada di Kecamatan Tanjung Selor dapat dilihat pada tabel hasil rekap database bahwa pada tahun 2020 terdapat unit usaha sebanyak 3480, pada tahun 2021 terdapat jumlah unit 8779, pada tahun 2022 terdapat 8774 mulai menurun sedikit, pada tahun 2023 jumlah unit mulai meningkat sebanyak 8920 unit usaha yang berada di kecamatan Tanjung Selor.

Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Pengangguran bisa terjadi karena berbagai macam alasan. Salah satunya karena kurangnya lapangan pekerjaan.

Begitu pula halnya di Provinsi Kalimantan Utara khususnya Kabupaten Bulungan mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Kabupaten Bulungan yang mempunyai tingkat pengangguran yang lumayan tinggi maka pemerintah daerah perlu melakukan tindak lanjut agar pengangguran yang ada di Kabupaten Bulungan ini

bisa berkurang. Adapun tingkat pengangguran yang berada di Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Pengangguran di Kabupaten Bulungan pada tahun 2020 – 2023

Indikator Ketenaga kerjaan	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pengangguran	2.956	3.100	3.245	3.929
Jumlah Angkatan Kerja	66.362	68.246	64.487	86.492

Sumber : *Badan Pusat statistik Kabupaten bulungan.*

Pengangguran di Kabupaten Bulungan 3.929 yang di mana yang kita lihat peningkatan pengangguran yang ada dari tahun 2020 sampai 2023 semakin meningkat, di antaranya dari tabel di atas bahwa dari tahun 2020 jumlah pengangguran sebesar 2.956, pada tahun 2021 jumlah pengangguran sebesar 3.100, tahun 2022 jumlah pengangguran 3.245, sedangkan pada tahun 2023 semakin meningkat yaitu sebesar 3.929 jumlah pengangguran.

Berdasarkan data diatas terdapat kenaikan jumlah pengangguran di Kabupaten Bulungan, diperlukan tindakan penurunan pengangguran di Kabupaten Bulungan khususnya di Kecamatan Tanjung Selor melalui pembinaan UMKM yang saat ini terus mengalami kenaikan jumlah yang cukup signifikan. Maka dari itu peneliti tertarik meneliti mengenai . (“ Persepsi Pelaku UMKM Terkait Peran Pemerintah daerah Di dalam Penurunan Tingkat Pengangguran Di Kecamatan Tanjung selor.)

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Apakah Peran pemerintah daerah dalam penurunan tingkat pengangguran di Kecamatan Tanjung Selor berpengaruh signifikan menurut persepsi pelaku UMKM.
2. Seberapa signifikan peran pemerintah daerah di dalam penurunan tingkat pengangguran di Kecamatan Tanjung Selor menurut Persepsi pelaku UMKM.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui.

1. Untuk mengetahui apakah Peran Pemerintah daerah di Dalam Penurunan Tingkat Pengangguran di Kecamatan Tanjung Selor berpengaruh signifikan menurut persepsi pelaku UMKM
2. Untuk mengetahui seberapa signifikan peran pemerintah daerah di dalam penurunan tingkat pengangguran di Kecamatan Tanjung Selor menurut Persepsi Pelaku UMKM

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak,terutama untuk penulis sendiri.

1. Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat di jadikan sebagai pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan teori yang penulis dapatkan di dalam perkuliahan serta penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan menambah pengetahuan mengenai Persepsi pelaku UMKM Terkait Peran Pemerintah daerah Di dalam penurunan tingkat pengangguran di kecamatan tanjung selor.
2. Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai salah satu penunjang dalam membuat kebijakan terutama dalam pengetasan masalah pengangguran.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Pengertian Persepsi

Persepsi (dari bahasa latin *perceptio*, *percipio*) adalah tindakan mengenali, menyusun dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Secara terminologi pengertian persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu proses seseorang mengetahui beberapa hal yang bisa dilakukan melalui penginderaan. Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali melalui proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indera, kemudian individu ada perhatian, lalu diteruskan ke dalam otak dan kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain: kemampuan untuk membedakan, mengelompokan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh sebab itu seseorang bisa saja terjadi karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri keperibadian dalam setiap individu yang bersangkutan.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang menurut Miftah Toha,

- 1) Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai, kebutuhan, dan motivasi.
- 2) Faktor eksternal: pengetahuan, informasi yang diperoleh, kebutuhan sekitar, eintensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

Faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi seseorang adalah:

- 1) *Frame of Reference*, yaitu kerangka pengetahuan yang dimiliki dan dipengaruhi oleh pendidikan, bacaan, penelitian, dll.
- 2) *Frame of Experience*, yaitu berdasarkan pengalaman yang pernah dialami yang tidak terlepas dari keadaan lingkungan sekitarnya.

2.2 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah dapat disimpulkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha tersebut dalam membangun perekonomian nasional dengan berlandaskan keadilan dan demokrasi, partisipasi UMKM dalam pembangunan ekonomi diantaranya berusaha menciptakan produk negara meningkatkan pengesporan, dan menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia. UMKM didefinisikan dengan cara-cara yang berbeda tergantung dari aspek-aspeknya di Indonesia, terdapat beberapa definisi UMKM berdasarkan lembaga yang mendefinisikannya diantaranya :

- a. Berdasarkan UU No.20 Tahun 2008 pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah :
 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro Sebagai mana di atur dalam Undang-undang ini.
 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai mana dimaksud dalam undang-undang ini.
 3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- b. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan penggunaan jumlah tenaga kerja pada setiap unit usaha yaitu :
 - 1. Usaha kecil merupakan unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja lima sampai 19 orang.
 - 2. Usaha menengah merupakan unit usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.
- c. Beberapa ahli pernah menjelaskan tentang definisi UMKM,diantaranya adalah :
 - 1. Menurut Rudjito,pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.
 - 2. Menurut Ina Primina, pengertian UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan indonesia,yaitu :
 - a). Industry manufaktur
 - b). Agribisnis
 - c). Bisnis kelautan
 - d). Sumber daya manusia

Selain itu Ina Primiana juga mengatakan bahwa UMKM dapat di artikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mawadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Adapun tujuan pemberdayaan usaha kecil yaitu (Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1)

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
- b. Meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional perluasan kesempatan kerja dan berusaha peningkatan ekspor serta peningkatan dan pemerataan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

Pemerintah berusaha menumbuhkan iklim usaha bagi Usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan melalui aspek-aspek pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan usaha dan perlindungan.

Dari aspek pendanaan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk memperluas sumber pendanaan, meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan, memberikan kemudahan dalam pendanaan dari aspek persaingan pemerintah menetapkan kebijakana untuk meningkatkan kerja sama sesama usaha kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar usaha kecil mencegah struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoly, dan monopsony yang merugikan usaha kecil serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorang atau kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil.

Dari aspek prasarana pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan usaha kecil dan memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha kecil dari aspek informasi pemerintah menetapkan kebijakan untuk membentuk dan memanfaatkan bank data dan jaringan informasi bisnis serta mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, teknologi, desain dan mutu dari aspek kemitraan pemerintah menetapkan kebijakan untuk mewujudkan kemitraan dan mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar. Dari aspek perizinan usaha pemerintah menetapkan kebijakan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan mengupayakan terwujudnya pelayanan sistem satu atap dan memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan.

Dari aspek perlindungan pemerintahan menetapkan kebijakan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar ruang pertokoan lokasi sentral industry, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan usaha kecil melalui pengadaan secara langsung dari usaha kecil mengatur pengadaan barang dan jasa dan pemborongan kerja pemerintah serta memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil diarahkan pada bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil dari bidang produksi dan pengolahan dengan cara meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan meningkatkan rancang bangun dan rekayasa serta memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan bahan baku bahan penolong dan kemasan upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil dari bidang pemasaran dengan cara melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran meningkatkan kemampuan manajemen dan teknis pemasaran menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi serta memasarkan produk usaha kecil. Upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil dari sumber daya manusia dengan cara memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan pelatihan dan konsultasi usaha kecil serta menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil.

Upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil dari bidang teknologi, dengan cara meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup meningkatkan kerja sama dan alih teknologi menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian teknologi dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi usaha kecil untuk meningkatkan kemampuan usaha para pelaku usaha menengah dan usaha besar diharapkan dapat melaksanakan hubungan kemitraan dengan usaha kecil baik memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha.

Kemitraan dilaksanakan dengan pola inti-plasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan dan bentuk-bentuk lainnya, disertai dengan upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil usaha kecil yang merupakan bagian integral dari dunia usaha secara umum di Indonesia mempunyai kedudukan potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya.

2.2.1 Karakteristik dan Ciri-ciri UMKM

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Usaha mikro kecil merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Usaha-usaha ini umumnya memiliki karakteristik yang hampir sama di setiap wilayah diantaranya memiliki tingkat penghasilan yang rendah, terkelola dengan tidak baik, bahkan dalam beberapa kasus kelompok usaha mikro kecil belum dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti gizi, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lain.

Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

- 1) Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang).
- 2) Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang).
- 3) Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

- 1) UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima
- 2) UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat penrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- 3) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Ukuran Usaha	Karakteristik
<p style="text-align: center;">Usaha Mikro</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap sewaktu-waktu dapat berganti. 2. Tempat usahanya tidak telalu menetap sewaktu-waktu dapat pindah tempat. 3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun. 4. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. 5. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. 6. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. 7. Umumnya belum akses pada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank. 8. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. 9. Contoh: Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar.

Usaha Kecil

1. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
2. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masa sederhana.
4. Keuangan perusahaan sudah mulai di pisahkan dengan keuangan keluarga.
5. Sudah membuat neraca usaha.
6. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
7. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
8. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.
9. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *bussiness planning*.
10. Contoh pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengepul lainnya.

<p style="text-align: center;">Usaha Menengah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi. 2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. 3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan. 4. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga. 5. Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. 6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih. 7. Contoh : usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.
--	--

Selain itu, berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM juga memiliki karakteristik tersendiri antara lain:

1. Kualitasnya belum standar. Karena sebagian besar UMKM belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Produk yang dihasilkan biasanya dalam bentuk handmade sehingga standar kualitasnya beragam.
2. Desain produknya terbatas. Hal ini di picu keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mengenai produk. Mayoritas UMKM bekerja berdasarkan pesanan, belum banyak yang berani mencoba berkreasi desain baru.
3. Jenis produknya terbatas. Biasanya UMKM hanya memproduksi beberapa jenis produk saja. Apabila ada permintaan model baru, UMKM sulit untuk memenuhinya. Kalaupun menerima, membutuhkan waktu yang lama.

4. Kapasitas dan daftar harga produknya terbatas. Dengan kesulitan menetapkan kapasitas produk dan harga membuat konsumen kesulitan.
5. Bahan baku kurang terstandar. Karena bahan bakunya diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.
6. Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna. Karena produksi belum teratur maka biasanya produk-produk yang dihasilkan sering apa adanya.

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008, kriteria UMKM adalah:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

- d. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

2.2.2 Keunggulan dan Peluang pembangunan

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki beberapa keunggulan komparatif terhadap usaha besar. Keunggulan tersebut antara lain: Dilihat dari sisi permodalan, pengembangan usaha kecil memerlukan modal usaha yang relatif kecil dibanding usaha besar. Disamping itu juga teknologi yang digunakan tidak perlu teknologi tinggi, sehingga pendiriannya relatif mudah dibanding usaha besar. Motivasi usaha kecil akan lebih besar, mengingat hidup matinya tergantung kepada usaha satu-satunya. Seseorang dengan survival motive tinggi tentu akan lebih berhasil dibandingkan seseorang yang motivasinya tidak setinggi itu. Selain itu adanya ikatan emosional yang kuat dengan usahanya akan menambah kekuatan para pengusaha kecil dalam persaingan. Memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyesuaikan dengan pola permintaan pasar, bahkan sanggup melayani selera perorangan. Berbeda dengan usaha besar yang umumnya menghasilkan produk masa (produk standar), perusahaan kecil produknya bervariasi sehingga akan mudah menyesuaikan terhadap keinginan konsumen. Disamping itu juga mempunyai kemampuan untuk melayani permintaan yang sangat spesifik yang bila diproduksi oleh perusahaan skala besar tidak efisien (tidak menguntungkan). Merupakan tipe usaha yang cocok untuk proyek perintisan. Sebagian usaha besar yang ada saat ini merupakan usaha skala kecil yang telah berkembang, dan untuk membuka usaha skala besar juga kadangkala diawali dengan usaha sekalakecil. Hal ini ditujukan untuk menghindari risiko kerugian yang terlalu besar akibat kegagalan jika usaha yang dijalankan langsung besar, sebab untuk memulai usaha dengan skala besar sudah barang tentu diperlukan modal awal yang besar juga. Gestation periode pendek sehingga quick yielding walaupun belum tentu high yielding. Periode waktu sejak memulai sampai dengan produksi relatif lebih cepat dibanding perusahaan besar sehingga otomatis lebih cepat menghasilkan. Akan tetapi karena modal yang ditanamkannya juga kecil, maka hasil yang diperoleh juga mungkin tidak besar. Perdagangan bebas telah memberikan peluang kepada para pengusaha di dalam negeri untuk dapat menjual produknya ke-luar negeri. Dengan dibukanya perdagangan bebas

maka barrier/penghambat untuk masuk ke suatu negara menjadi tidak ada lagi. Dengan perkataan lain pergerakan barang dari suatu negara ke Negara lain menjadi mudah tanpa ada penghambat. Disamping itu dengan adanya depresiasi rupiah, maka perdagangan luar negeri (ekspor) menjadi lebih terbuka dengan memanfaatkan persaingan harga.

2.2.3 Sasaran Pembinaan dan Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan upaya/proses untuk membuat sesuatu yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Pembinaan adalah suatu perlakuan agar UMKM memiliki kemampuan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui pembinaan. Adapun sasaran pembinaan yang dilakukan terhadap pengusaha kecil adalah mengurangi atau kalau mungkin menghilangkan kelemahan-kelemahan dan hambatan-hambatan yang dimiliki/dihadapi perusahaan serta meningkatkan dan memanfaatkan keunggulan dan peluangnya, seperti: a. Berkembangnya skala usaha. b. Peluang usaha. c. Pangsa pasar. Dengan adanya intervensi dari pihak eksternal, diharapkan skala usaha mereka dapat ditingkatkan dari kecil menjadi menengah, dan dari menengah menjadi besar. Begitu juga dengan adanya bantuan untuk akses ke pihak luar, maka peluang usaha dan pangsa pasar dapat dikembangkan. Akses terhadap sumber permodalan membantu akses ke penyandang dana/investor atau pemberi/penyedia kredit akan memecahkan masalah kebutuhan permodalan perusahaan, karena bukan mereka tidak mau memberikan pendanaan kepada para pengusaha, akan tetapi karena masing-masing tidak tahu dan tidak saling kenal. Oleh karena itu diperlukan adanya fasilitator yang bisa menghubungkan antara kedua pihak tersebut.

Peningkatan kemampuan kewirausahaan. Kemampuan kewirausahaan merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha, dimana seorang pengusaha harus mampu mengambil keputusan, mendelegasikan wewenang secara jelas, mengambil risiko yang moderat, memotivasi karyawan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dan sifat kewirausahaan lainnya. Peningkatan kemampuan manajerial dan kemampuan teknis. Seorang pengusaha adalah seorang manajer, oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk mengkoordinasikan semua bawahannya serta manage seluruh potensi yang dimiliki. Keterampilan teknis karyawan pada Usaha Kecil Menengah umumnya rendah, hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas produk yang dihasilkan yang seringkali tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Peningkatan dan pemantapan keterkaitan dan kemitraan yang saling membutuhkan, saling menghidupi, dan saling menguntungkan. Saat ini seringkali terjadi kemitraan yang tidak sesuai dengan

pola yang diinginkan. Dalam kemitraan Usaha kecil dengan Usaha Besar, seharusnya usaha besar bisa memberikan subsidi kepada usaha kecil, tapi seringkali dijumpai kondisi sebaliknya dimana usaha kecil yang mensubsidi usaha besar.

2.2.4 Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pemberdayaan UMKM merupakan perlakuan yang diberikan terhadap UMKM yang tidak berdaya supaya menjadi berdaya dalam arti menghilangkan atau paling tidak mengurangi kelemahannya serta mengaktualkan potensi dan memanfaatkan peluangnya. UMKM yang berdaya adalah UMKM yang memiliki kemampuan permodalan yang cukup, memiliki akses yang luas baik terhadap investor, sumber bahan baku, calon konsumen dan para stakeholder lain, serta memiliki daya saing yang kuat. Dalam rangka meningkatkan kemampuannya UMKM membutuhkan: pelatihan, pendampingan, konsultasi, dan temu usaha. Berkaitan dengan fungsi pendampingan dan konsultasi, selama ini berbagai lembaga/instansi telah melakukannya seperti: Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Departemen Pertanian, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di BKKBN, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Perguruan Tinggi, konsultan swasta dan sebagainya. UMKM yang berdaya adalah UMKM yang memiliki kemampuan permodalan yang cukup, memiliki akses yang luas baik terhadap investor, sumber bahan baku, calon konsumen serta para stakeholder, memiliki daya saing yang kuat. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: meningkatkan akses perbankan/lembaga keuangan, pemberdayaan KKMB, melalui kemitraan, dan meningkatkan kemampuan kewirausahaan.

2.3 Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahnya mempunyai peranan yang sama. Peran

merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status social.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal penting yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur social masyarakat.

Menurut Veithzal Rivai (2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Miftha Thoha (2005:10) peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk social memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi di antara mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Menurut J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
4. Menghidupkan system pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan social yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berdasarkan pelaksanaannya peranan social dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Peranan yang diharapkan (excepted roles), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan

dilaksanakan secermat-cermatnya dan harus dilaksanakan dan peranan ini tidak dapat ditawar seperti yang ditentukan.

2. Peranan yang disesuaikan (actual roles) yaitu, cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat. Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu.

2.4 Pengertian Peran Pemerintah

Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham (Tjokroamidjojo, 1988:18) dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:

1. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.
2. Kemudian timbul pengertian tentang Service State, di mana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak fikiran-fikiran mengenai Welfare State atau negara kesejahteraan.
3. Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai enterpreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi “development agent” atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan.

Tjokroamidjojo (1988:19) Klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat dikemukakan pula pikiran dari Irving Swerdlow yang menyebutkan bahwa involvement atau campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih positif merupakan proses pembangunan), dapat dilakukan dengan lima macam cara:

1. Operasi langsung (operation: pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.
2. Pengendalian langsung (direct control): penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan

- pemerintahan yang “action lader” (yang berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau kalau tidak, berusaha untuk menjadi action lader.
3. Pengendalian tak langsung (indirect control): cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk “daftar barang tertentu”
 4. Pemengaruhan langsung (direct influence): di sini dilakukan persuasi dan nasehat: misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut menggabungkan diri dalam koperasi tertentu, atau ikut jadi akseptor program keluarga berencana.
 5. Pemengaruhan tak langsung (indirect influence): ini adalah bentuk involment yang paling ringan, misalnya hanya memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan pemerintah, contoh-contoh teladan tentang efesiensi dan ketidakborosan. Ada lagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru (promoting a receptive attitude toward innovation).

Peranan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan (2009:132) peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.

Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar (basic security) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial (Nyoman Sumaryadi, 2010 : 21).

Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan Negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan (Sitanggang, 1996 :134). Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dikehendaki, hal ini sejalan dengan Talidzu Ndraha (2011) peranan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat diperlukan sehingga menimbulkan hubungan transaksional seperti sebagai berikut:

1. Pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat, setiap pilihan berisi janji.
2. Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya. Kebebasannya itu dilindungi dan dijamin melalui civil service.
3. Jika konsumen telah menjatuhkan pilihan diantara produk yang ditawarkan, maka produsen/penjual (pemerintah) harus menepati janjinya.
4. Untuk menguji apakah janji tersebut ditepati, konsumen melakukan kontrol sosial terhadap produk yang diterimanya.
5. Jika janji ternyata ditepati, hal itu berarti produsen (pemerintah) bertanggung jawab jika tidak produsen harus bertanggung jawab.
6. Jika produsen (pemerintah) bertanggung jawab, dalam hal konsumen (masyarakat) tumbuh kepercayaan terhadap janji produsen (pemerintah).

2.5 Pengertian Daerah

Menurut Lincoln Arsyad dalam bukunya yang berjudul perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah, pengertian daerah berbeda-beda tergantung aspek ditinjaunya, dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian yaitu (Arsyad, : 1999: 107-108).

- a. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadinya di daerah dan didalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapitanya budayanya geografisnya dan sebagainya daerah dalam pengertian ini disebut daerah homogeny.
- b. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi yang disebut daerah modal.
- c. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya jadi daerah disini didasarkan pada pembagian administrasi suatu negara disebut sebagai daerah perencanaan atau daerah administrasi.

2.6 Pengertian Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

Menurut sudono sukirno pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat

memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur.

Menurut Iskandar putong pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang akan mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya mereka adalah yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masanya kerja.usia kerja adalah usia yang tidak dalam masa sekolah tapi di atas usia anak-anak, relatif di atas 18 tahuun.

Selanjutnya *International Labor Organization (ILO)* memberikan definisi pengangguran, yaitu :

- a. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja dan bersedia menerima pekerjaan serta sedang mencari pekerjaan.
- b. Setengah pengangguran terpaksa adalah seseorang yang berkerja sebagai buruh karyawan dan pekerja mandiri (berusaha sendiri) yang selama periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masi mencari pekerjaan lain/tambahan (BPS,2001).

Sedangkan menurut Survai Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) menyatakan bahwa :

- a. Setengah pengangguran terpaksa adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu yang masi mencari pekerjaan atau yang masi bersedia menerima pekerjaan lain.
- b. Setengah pengangguran sukarela adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu namun tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain, (BPS,2000).

2.6.1 Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejatraan pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tinggi pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan polotik , keamanan dan sosial sehingga menggagu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan perkapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia dikenal istilah pengangguran dimana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh banyak orang.

Jumlah penduduk dalam suatu negara dapat dibedakan menjadi penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Yang termasuk kedalam kelompok bukan usia kerja (usia non produktif) yaitu usia 0-14 tahun dan manusia lanjut usia (muda) yang berusia > 65 tahun. Dari jumlah penduduk usia kerja yang masuk angkatan kerja adalah mereka yang mencari kerja atau bekerja. Sebagian yang tidak bekerja (dengan berbagai alasan) tidak termasuk angkatan kerja. Tidak semua angkatan kerja memperoleh lapangan pekerjaan mereka inilah yang disebut pengangguran.

Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak/belum mendapat pekerjaan, dalam membicarakan mengenai pengangguran yang selalu diperhatikan bukanlah mengenai jumlah pengangguran, tetapi mengenai tingkat pengangguran yang dinyatakan sebagai persentase dari angkatan kerja. Membandingkan jumlah pengangguran diantaranya berbagai negara tidak akan ada manfaatnya karena tidak dapat memberikan gambaran yang tepat tentang perbandingan masalah yang berlaku.

Dari data tenaga kerja dapat diketahui dan dihitung berbagai konsep yang berkaitan dengan tingkat pekerjaan dan tingkat pengangguran. Konsep-konsep yang dimaksud adalah partisipasi angkatan kerja (TPAK) tingkat pekerjaan (employment rate) dan tingkat pengangguran (unemployment rate). Angka-angka semacam ini berguna untuk mengenali situasi yang berlangsung di pasar tenaga kerja. Pemahaman tentang situasi pasar kerja berguna bukan saja bagi perumusan kebijaksanaan tenaga kerja dan menciptakan kesempatan kerja.

2.6.2 Macam – Macam Pengangguran

a. Berdasarkan jam kerja

Berdasarkan jam kerja, pengangguran di kelompokkan menjadi tiga macam yaitu :

1. Pengangguran terselubung (*Disguised Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu
2. Setengah pengangguran (*Under Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
3. Pengangguran terbuka (*open Unemployment*) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapatkan pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

b. Berdasarkan penyebab terjadinya

berdasarkan penyebab terjadinya pengangguran di kelompokkan menjadi 7 macam yaitu :

1. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan pengangguran yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang di tentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Misalnya seperti perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri untuk sementara menganggur, berhenti dari pekerjaan yang lama mencari pekerjaan yang baru yang lebih baik.
2. Pengangguran konjungtural (*cycle unemployment*)
Pengangguran konjungtural adalah pengangguran yang di akibatkan oleh perubahan gelombang (naik –turunnya) kehidupan perekonomian/ siklus ekonomi. Misalnya seperti di suatu perusahaan ketika sedang maju maka akan membutuhkan tenaga kerja baru untuk perluasan usaha. Sebaliknya ketika usahanya merugi terus maka akan terjadi pengangguran karyawan atau PHK (pemutusan hubungan kerja) atau pemecatan.

3. Pengangguran struktural (*Structural Unemployment*)

Pengangguran structural adalah pengangguran yang di akibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang misalnya seperti suatu daerah yang tadinya agraris (pertanian) menajdi daerah industry maka tenaga bidang pertanian akan menganggur. Pengangguran structural bisa di akibatkan oleh beberapa kemungkinan ,seperti

- Akibat permintaan berkurang
- Akibat kemajuan dan pengguna teknologi
- Akibat kebijakan pemerintahan

4. Pengangguran musiman (*seasonal Unemployment*)

Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus menganggur. misalnya seperti pada musim panen para petani bekerja dengan giat sementara sebelumnya banyak menganggur

5. Pengangguran teknologi

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau pengantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin misalnya seperti sebelum ada penggilingan padi orang berprofesi sebagai penumbuk padi bekerja, setelah ada mesin pengilingan padi maka mereka tidak bekerja lagi.

6. Pengangguran politis

Pengangguran politis terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang secara tidak langsung atau tidak mengakibatkan terjadinya pengangguran.misalnya seperti penutupan Bank-bank bermasalah sehingga menimbulkan PHK (pemutusan hubungan kerja).

7. Pengangguran Defltoir

Pengangguran deflotoir ini di sebabkan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan atau karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja maka terjadinya pengangguran.

Menurut Iskandar putong pengangguran terdiri atas beberapa jenis diantaranya yaitu :

- a. Pengangguran siklus, yaitu pengangguran yang terjadi apabila permintaan terlalu rendah dari output potensial perekonomian.
- b. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perputaran dalam lingkup pekerjaan dan tenaga kerja.
- c. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan dan juga keterampilan, jenis kelamin, pekerjaan industri, geografis, informasi dan tentu saja struktur permintaan tenaga kerja.

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

2.6.3 Dampak Pengangguran

Tingginya tingkat pengangguran dalam sebuah perekonomian akan mengakibatkan kelesuan ekonomi dan merosotnya tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai akibat menurunnya pendapatan masyarakat. Dampak pengangguran terhadap ekonomi masyarakat meliputi hal-hal berikut ini :

- a. Pendapatan perkapita, orang yang tidak memiliki penghasilan hidupnya akan membebani orang lain yang bekerja. Dampaknya adalah terjadinya penurunan pendapatan perkapita. Dengan kata lain bila tingkat pengangguran tinggi maka pendapatan perkapita akan menurun dan sebaliknya bila tingkat pengangguran rendah pendapatan mereka yang masih bekerja tetap.
- b. Pendapatan negara orang yang bekerja mendapatkan balas jasa berupa upah/gaji tersebut sebelum sampai di tangan penerima di potong pajak penghasilan terlebih dahulu pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara sehingga bila tidak banyak orang yang bekerja maka pendapatan negara dari pemasukan pajak penghasilan cenderung berkurang.
- c. Beban psikologis, semakin lama seseorang menganggur semakin besar beban psikologis yang ditanggungnya. Orang yang memiliki pekerjaan berarti ia

memiliki status sosial di tengah-tengah masyarakat, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dalam jangka waktu lama akan merasa rendah diri (minder) karena statusnya yang tidak jelas.

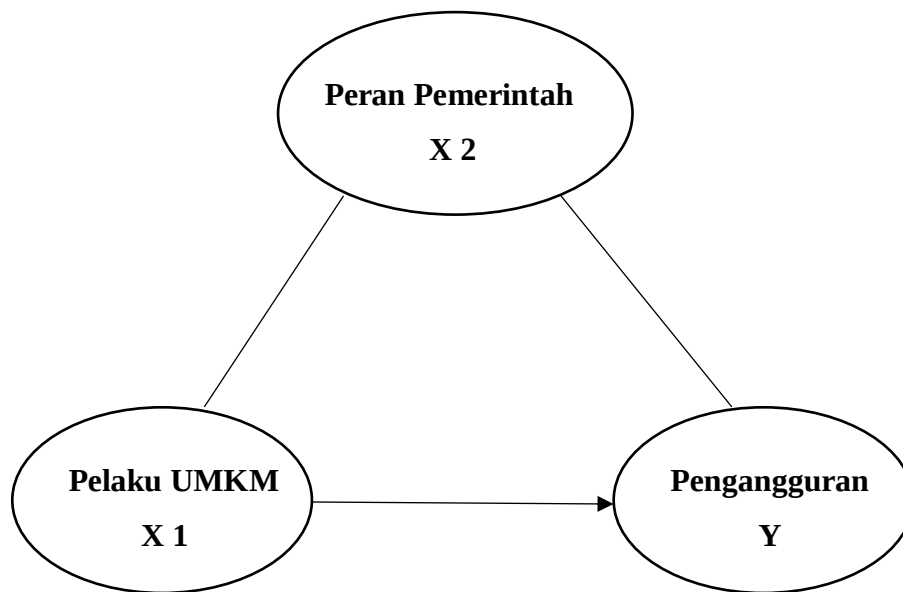
- d. Munculnya biaya sosial, tingginya tingkat pengangguran akan menimbulkan pengeluaran berupa biaya-biaya sosial seperti biaya pengadaan penyuluhan, biaya pelatihan, dan biaya keamanan sebagai akibat kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas.

Salah satu factor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai.

Jika ditinjau dari sudut pandang individu, pengangguran menimbulkan berbagai macam masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Di samping itu ia dapat mengganggu taraf kesehatan keluarga. Pengangguran yang berkepanjangan menimbulkan efek psikologi yang buruk atas dari pengangguran dan keluarganya.

Apabila keadaan pengangguran di suatu negara buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Nyatalah bahwasanya masalah pengangguran adalah masalah yang sangat buruk efeknya kepada perekonomian dan masyarakat, oleh karenanya secara terus menerus usaha-usaha dilakukan untuk mengatasinya.

2.7 Kerangka Pikir



2.8 Hipotesis

Menurut Kerlinger (2006) hipotesis merupakan pernyataan dengan (conjectural) tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Menurut sugiyono (2009) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karenan jawaban yang diberikan baru berdasarkan

1. Diduga adanya pengaruh positif antara variabel Persepsi Pelaku UMKM terkait Peran Pemerintah Daerah di Dalam Penurunan tingkat Pengangguran di Kecamatan Tanjung Selor
2. Diduga adanya pengaruh positif antara variabel Peran Pemerintah Daerah di Dalam Penurunan Tingkat Pengangguran di Kecamatan Tanjung Selor
3. Diduga adanya pengaruh positif antara variabel Persepsi pelaku UMKM di dalam penurunan tingkat pengangguran di kecamatan tanjung selor

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pemahaman yang muncul dikalangan pengembang penelitian kuantitatif adalah peneliti dapat dengan sengaja mengadakan perubahan terhadap dunia sekitar dengan mealakukan eksperimen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif ini melibatkan pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang pendapat orang atas sebuah isu atau topik

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada pengumpulan dan analisis data berbentuk angka (numerik) untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol fenomena yang diminati. 1 Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal yang diolah dengan metode statistik. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikasi hubungan antar variabel.

Menurut Tanzeh pada bukunya pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, dan membangun fakta, menunjukkan gabungan antarvariabel, memberikan deskripsi statistic, menaksir dan meramalkan Desain penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif harus terstruktur, baku, formal , dan dirancang sematang mungkin sebelumnya. Pendekatan yang dilaukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang berfokus pada “ Pengaruh Peran Pemerintah daerah terhadap penurunan tingkat pengangguran melalui pembinaan UMKM di kecamatan Tanjung Selor.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.

Lokasi penelitian di Kecamatan tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan utara, waktu penelitian dilakukan selama 6 bulan sejak penelitian awal hingga akhir hasil penelitian dan penyusunan serta penyerahan menjadi laporan akhir hasil penelitian.

3,3 Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2014) definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat di ukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak sehingga memungkinkan bagi peeliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau menegembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tjokroamidjojo (1988:19) Klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat dikemukakan pula pikiran dari Irving Swerdlow yang menyebutkan bahwa involvement atau campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih positif merupakan proses pembangunan), dapat dilakukan dengan lima macam cara:

1. Operasi langsung (operation: pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.
2. Pengendalian langsung (direct control): penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang “action lader” (yang berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau kalau tidak, berusaha untuk menjadi action lader.

3. Pengendalian tak langsung (indirect control): cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk “daftar barang tertentu”
4. Pemengaruhan langsung (direct influence): di sini dilakukan persuasi dan nasehat: misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut menggabungkan diri dalam koperasi tertentu, atau ikut jadi akseptor program keluarga berencana.
5. Pemengaruhan tak langsung (indirect influence): ini adalah bentuk involment yang paling ringan, misalnya hanya memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan pemerintah, contoh-contoh teladan tentang efesiensi dan ketidakborosan. Ada lagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru (promoting a receptive attitude toward innovation).

Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

Menurut sudono sukirno pengguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur.

Menurut Iskandar putong pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang akan mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya mereka adalah yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masanya kerja.usia kerja adalah usia yang tidak dalam masa sekolah tapi di atas usia anak-anak, relatif di atas 18 tahun.

Pengertian pembinaan yang lain adalah suatu usaha,tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. (Peorwadarmita, 1991:44). Hal ini sesuai juga dengan yang dikemukakan oleh miftah Thoha dalam bukunya yang menyebutkan bahwa: “ pembinaan adalah suatu tindakan,proses,hasil atau pernyataan yang lebih baik dalam hal ini menunjukan adanya kemajuan ,peningkatan pertumbuhan , evolusi atas sesuatu. Adanya dua unsur dari pengertian ini yaitu pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan,dan kedua pembinaan itu bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu” (Miftah Thoha,2003 : 7)

Berdasarkan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dapat disimpulkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha tersebut dalam membangun perekonomian nasional dengan berlandaskan keadilan dan demokrasi, partisipasi UMKM dalam pembangunan ekonomi diantaranya berusaha menciptakan produk negara meningkatkan pengesporan, dan menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia. UMKM didefinisikan dengan cara-cara yang berbeda tergantung dari aspek-aspeknya di Indonesia, terdapat beberapa definisi UMKM berdasarkan lembaga yang mendefinisikannya diantaranya

Berdasarkan UU No.20 Tahun 2008 pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro Sebagai mana di atur dalam Undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai mana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur Dalam Undang-Undang ini.

3.4 Pengukuran Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini Persepsi pelaku UMKM dan peran pemerintah daerah dinotasikan sebagai (X 1 dan X 2) yang merupakan variabel yang mempengaruhi, sedangkan penurunan tingkat pengangguran dinotasikan sebagai (Y) yang merupakan variabel yang di pengaruhi.

3.5 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner, dengan kata lain peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil atas pelaku binaan UMKM, dalam penentuan sampel maka ditetapkan oleh peneliti beberapa kriteria yang digunakan sebagai sampel yaitu jumlah tingkat pengangguran dan binaan UMKM yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik kabupaten Bulungan dan Dinas Disprindakop kabupaten Bulungan.

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Penulis menggunakan sampel yang dibina langsung oleh disprindakop dan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 – 2023.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berdasarkan data tingkat pengangguran dan binaan UMKM yang sudah di survai langsung oleh disprindakop kabupaten bulungan dan Badan Pusat Statistik kabupaten Bulungan, 2020 – 2023.

3.6 Jenis dan Sumber data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung melalui dinas-dinas tertentu.

Data sekunder berasal dari sumber internal dan eksternal dalam hal ini data sekunder bersifat internal melalui dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM kabupaten bulungan, dan Badan Pusat Statistik kabupaten Bulungan. yaitu data tingkat pengangguran dan pembinaan UMKM pada tahun 2020 – 2023.

3.7 Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dan juga informasi dalam penelitian ini menggunakan metode::

1. Angket (*Questionnaire*) angket merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis kepada responden. Pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian pada tiap jawaban pertanyaan mempunyai makna dalam menguji hipotesis.
2. Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan literatur dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.8 Metode Analisis

Mengenal metode analisis data adalah salah satu tahap yang penting dalam melakukan penelitian. Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis dimana data primer atau data sekunder yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Metode ini dibagi menjadi dua bagian besar berdasarkan jenis datanya yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pengolahan data dengan menggunakan teknik statistik adalah istilah untuk metode analisis kuantitatif, dan pengolahan data menggunakan analisis tematik dengan pengkodean dan berupa teks merupakan metode analisis kualitatif.

Menurut para ahli, kegiatan analisis data adalah hal yang sangat sulit karena membutuhkan kerja keras, kreativitas pikiran, dan wawasan tinggi. Metode analisis dari pada setiap penelitian pun tidak dapat disamakan, apalagi jika metode pengumpulan datanya sudah berbeda. Prinsip metode analisis data adalah penggunaan prosedur dan teknik yang tepat untuk menafsirkan hasil dan perencanaan teknik pengumpulan data agar analisisnya mudah serta memberikan hasil akurat. Untuk itu, pada kesempatan ini kita akan mengenal lebih jelas lagi perbedaan dari masing-masing jenis metode analisis data tersebut. Yuk, simak penjelasannya!

1. *Qualitative Analysis*

Metode analisis data ini merupakan metode dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi. Selanjutnya dari keseluruhan data tersebut dilakukan proses pengklasifikasian berdasarkan kebutuhan dengan proses pencodingan. Tahap terakhir pada metode ini adalah interpretasi data. Proses interpretasi data sebenarnya dilakukan secara bersamaan selama coding. Upaya interpretasi dilakukan bersamaan dalam mengklasifikasikan data. Langkah interpretasi untuk menganalisa data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan.

Metode ini memerlukan pendekatan dari data yang sifatnya lebih subjektif. Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Kelebihan metode ini adalah kedalaman dari hasil analisisnya. Di sisi lain, inilah nilai lebih dari metode analisis kualitatif, di mana si analis memainkan peran penting dalam proses analisis sebagai bagian dari alat penelitian.

2. *Quantitative Analysis*

Metode analisis data kuantitatif adalah metode yang bergantung kepada kemampuan untuk menghitung data secara akurat. Selain itu, metode ini juga memerlukan kemampuan untuk menginterpretasikan data yang kompleks. Beberapa contoh metode analisis kuantitatif, seperti analisis deskriptif, regresi, dan faktor. Metode analisis data kuantitatif mempunyai berbagai macam jenis analisis seperti teknik korelasional, regresi, komparasi, deskriptif dan sejenisnya.

Metode ini merupakan pendekatan pengolahan data melalui metode statistik atau matematik yang terkumpul dari data sekunder. Kelebihan dari metode ini adalah kesimpulan yang lebih terukur dan komprehensif. Metode metode lainnya yang dapat digunakan dalam proses analisis data adalah analisis teks, statistical, diagnosa, prediktif, perspektif.

3. *Kombinasi Qualitative Dan Quantitative*

Menurut Creswell (2009), metode analisis kombinasi ini merupakan pendekatan yang mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Hal ini mencakup landasan filosofis, penggunaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dan mengkombinasikan

kedua pendekatan. Creswell juga menjelaskan bahwa metode analisis kombinasi disebut juga sebagai metode multimethods (multi metode). Metode ini digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan analisis, sehingga didapatkan data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan obyektif.

4. Analisis Regresi

Data yang sudah terkumpul dan akan digunakan untuk memprediksi data selanjutnya bisa dilakukan dengan metode analisis regresi. Analisis Regresi merupakan bagian dari metode analisis data kualitatif. Pada metode tersebut, data yang sudah ada bisa menjadi dasar untuk memprediksi tren masa depan. Metode analisis regresi mampu mengukur hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen.

Metode analisis regresi dinilai efektif untuk mencari tahu hal-hal yang bisa dioptimalkan dengan melihat tren atau kecenderungan dan hubungan antar data faktor. Model analisis regresi dapat linier, non-linier, logistik, life data, dan sebagainya. Adapun software untuk membantu proses analisis ini adalah SPSS.

3.9 Alat Analisis data

Penelitian menggunakan analisis data statistik yang berbentuk korelasi atau dapat dikatakan dengan hubungan dengan menggunakan regresi sederhana dengan menggunakan SPSS 23 for windows. Peneliti menggunakan data statistik deskriptif untuk dapat memberikan gambaran umum kondisi yang terjadi di lokasi penelitian atau data hasil penelitian. Untuk menguji regresi linier sederhana, uji statistiknya menggunakan uji t. Selain itu peneliti menggunakan regresi sederhana untuk menunjukkan adanya pengaruh antar variabel-variabel tersebut. Alasan peneliti menggunakan regresi karena ada variabel bebas dan variabel terikat. Adapun regresi sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$Y_1 = a + b_1.X_1$$

$$Y_1 = a + b_1.X_1$$

Keterangan:

Y_1 = Nilai yang diprediksi

a = Konstanta atau bila harga $X = 0$

b = Koefisien regresi

X_1 = Nilai variabel independen